



LAKIP 2020

KESBANGPOL



PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja OPD 2020 dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016-2021 hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan *Clean Government* dan *Good Governance*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan OPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 ini tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua aparatur di OPD baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga laporan akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Parit Malintang, Februari 2021

**Pt. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SADRIL, S.Sos, MM

NIP. 19650204 198602 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	2
1.2 Permasalahan Utama	6
1.3 Sistematika Pelaporan	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Rencana Strategis	14
2.1.1. Visi	14
2.1.2. Misi	15
2.1.3. Tujuan dan Sasaran	15
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.....	17
2.3 Perjanjian Kinerja	18
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	19
3.2 Realisasi Anggaran	40
BAB IV. PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Langkah Kedepan	43

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan Padang Pariaman yang Baru, Religius, Cerdas dan Sejahtera. Oleh karena itu, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mengemban misi Bupati yaitu mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Berkeadilan, Demokratis melalui pembinaan Aparatur dan Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas dapat dilihat dari Laporan Kinerja. Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang secara operasional dilakukan melalui program dan kegiatan harus diinformasikan secara akuntabilitas, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang ditunjang dengan program dan kegiatan akan membutuhkan biaya pada setiap Tahun Anggarannya.

Penyampaian data dan informasi secara akuntabilitas merupakan pelaporan kinerja dari Instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku unsur penyelenggara pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dari rencana yang telah ditetapkan pada satu Tahun Anggaran dengan tetap berdasarkan pada perencanaan 5 (lima) Tahun Anggaran atau perencanaan jangka menengah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD).

A. GAMBARAN UMUM KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, mulai 1 Januari 2012 Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Badan Kesbangpol dan Linmas) berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, kemudian Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, bahwa Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman merupakan salah satu perangkat daerah dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dipimpin oleh kepala kantor dan beralamat di Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Pariaman, paragraf 2 pasal 28 ayat (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas :

**MELAKSANAKAN PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK**

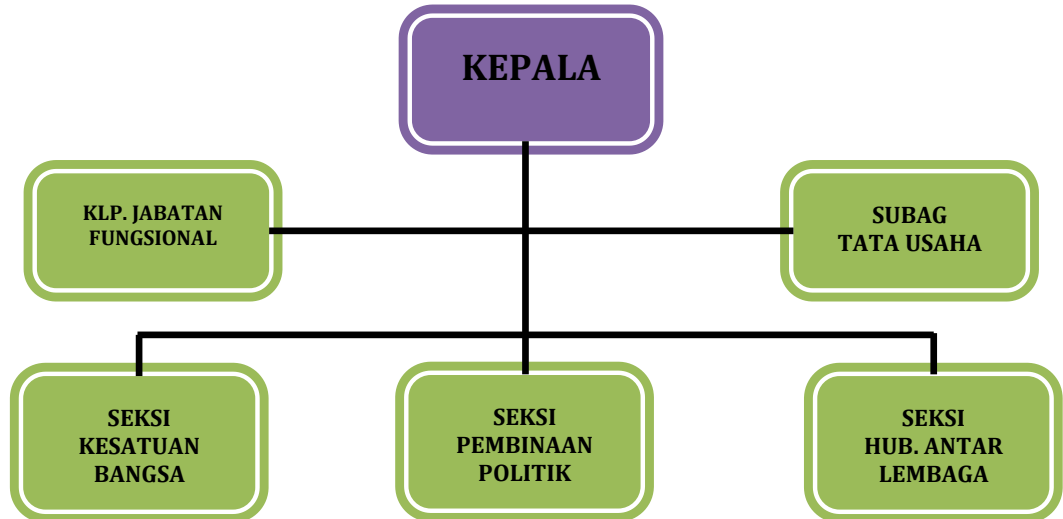
Untuk melaksanakan tugas seperti tersebut diatas dan sesuai dengan pasal 28 ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang urusan kesatuan bangsa dan politik
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

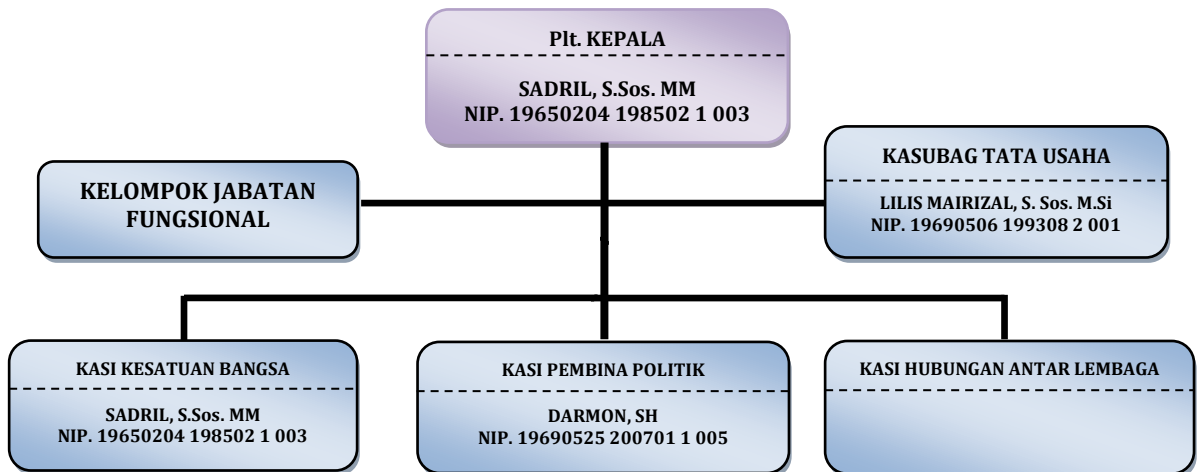
A.1 STRUKTUR ORGANISASI

Gambar : 1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



PEJABAT STRUKTURAL ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PADANG PARIAMAN



A.2 URAIAN TUGAS DAN DASAR HUKUMNYA

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2012, Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

A. KEPALA KANTOR

Merumuskan program kerja dan petunjuk kerja, mengoordinasikan, membina dan mengarahkan kegiatan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik menetapkan program kerja kantor dan mengendalikan pelaksanaannya, memantau serta mengevaluasi perkembangan kegiatan serta merumuskan kebijakan teknis di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor.
2. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis kantor sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
3. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang kepegawaian daerah.
4. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan kepegawaian daerah.
5. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, fungsi dan pengadaan, mutasi kepegawaian, data dan pengembangan pegawai, disiplin dan pembenahan.

6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelanjutan pelaksanaan kegiatan kantor.
7. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPD dan LPPD Kantor serta pelaksanaan tugas-tugas teknis, evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, perencanaan dan pengembangan diklat pimpinan diklat teknis.
8. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis kepegawaian daerah.
9. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
10. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

A.3 SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIMILIKI INSTANSI

Pejabat dan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pegawai Struktural yang berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil, dibantu oleh 7 (tujuh) orang Tenaga Swakelola dan 2 (dua) orang Tenaga Sukarela, dengan rincian nama sebagai berikut :

Tabel. 1
DAFTAR PEGAWAI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

No.	N A M A	N I P	GOL	ESELON	J A B A T A N	PDD K
1	SADRIL, S.Sos. MM	19650204 198602 1 003	III/d		Plt. Kepala Kantor	S.2
2	LILIS MAIRIZAL, S.Sos. M.Si	19690506 199308 2 001	IV/a	IV/a	Kasubag Tata Usaha	S.2
3	SADRIL, S.Sos. MM	19650204 198602 1 003	III/d	IV/a	Kasi Kesatuan Bangsa	S.2
4	DARMON, SH	19690525 200701 1 005	III/c	IV/a	Kasi Pembinaan Politik	S.1
5	MULYADI	19640201 198403 1 006	III/b	-	S t a f	SMA
6	SYAFRUDIN	19660701 200604 1 004	I/d	-	S t a f	SMP
7	SRI WAHYUNI, A.Md	19900526 201503 2 002	II/d	-	S t a f	D.III

8	AGUSMITA. Z, S.Sos	19861108 201406 2 002	II/b	-	Staf	SMA
9	ENNY NOVRIITA DEWI, SE	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
10	ERFINA YENTI	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
11	MURNIATI	-	-	-	Tenaga Swakelola (Kebersihan)	SMP
12	YOLA SISKI NANDA, S.pd	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
13	SANTA SAPUTRA RAMAYANSAH	-	-	-	Tenaga Swakelola	SMA
14	METRALIADI, S.Ak	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
15	TRI MURTI, SH	-	-	-	Tenaga Swakelola	S.1
16	NICO PRATAMA PUTRA, SH	-	-	-	Tenaga Sukarela	S.1
17	SYELFI SULPIKA RAHMI, SH	-	-	-	Tenaga Sukarela	S.1

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi :

Identifikasi permasalahan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Hambatan Eksternal

1. Aspek kelembagaan :

1. Dengan keluarnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur

dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Kantor Kesbangpol Kabupaten Padang Pariaman belum terukur secara jelas.

2. Karena tugas dan fungsi lembaga kesatuan bangsa dan politik tidak terkait secara langsung dengan visi dan misi kepala daerah sehingga kesulitan dalam penganggaran karena tidak termasuk dalam program prioritas pembangunan.
3. Belum maksimalnya tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, Tim Komunitas Intelijen Daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2. Aspek politik :

- Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
- Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
- Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.

3. Aspek Sosial

1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan
3. Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa

-
4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
 5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya
4. Aspek Ekonomi :
1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
 2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
 3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
 4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
 5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
 6. Masih kurangnya sinergitas antara aparat dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)
5. Aspek Keamanan dan Ketentraman :
1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
 2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.

-
3. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.
 4. Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
 5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

Meskipun menghadapi berbagai persoalan yang menjalankan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik masih memiliki kemampuan dan peluang untuk tetap komitmen menjalankan tugas yang diemban dengan memanfaatkan potensi yang ada secara maksimal, serta menjalankan dan memanfaatkan hasil koordinasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pembinaan wawasan kebangsaan, di antaranya adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang. Suatu kondisi / kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman dapat disusun ke dalam tabel sebagai berikut:

Tabel.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saat ini	Standar Yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat	Sedang	Peraturan perundang-an, perbup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas Pembinaan Wasbang 2. Cakupan peserta pembinaan Wasbang 3. Kompetensi narasumber 4. Koordinasi antar instansi terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurang pemisah antara Masyarakat mampu & tak mampu 2. Munculnya sifat individualis dalam Masyarakat 3. Kehidupan yg makin berat & kompleks 4. Tingkat pendidikan masyarakat 	Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa & bernegara Pada sebagian kelompok masyarakat
Tingkat partisipasi masyarakat dlm berpolitik	Sedang	Peraturan perundang-an, perbup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensitas Pembinaan pada masyarakat dan Parpol 2. Sosialisasi Peraturan perundangan pada masyarakat & anggota parpol 3. Fasilitasi pada partai politik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi politik yg menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap politik 2. Sikap apatis Masyarakat 3. Tingkat kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Hak politiknya 	Masih terjadinya fluktuasi partisipasi masyarakat dalam politik
Pemahaman ketahanan bangsa	Sedang	Peraturan perundang-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instan- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemajuan teknologi in- 	Masih kurangnya pembinaan keta-

dan bela negara Masyarakat		an, Perbup	<ul style="list-style-type: none"> 2. Intensitas Pembinaan bela negara 3. Cakupan peserta pembinaan bela Negara 4. Kompetensi narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> formasi su- Dah sampai ke daerah 2. Efek globalisasi yang sulit dibendung 3. Tingkat pemahaman Masyarakat 4. Munculnya berbagai ormas / LSM 	<ul style="list-style-type: none"> hanan nasional & bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan & organisasi lembaga swadaya masyarakat
Pemahaman Masyarakat terhadap bahaya narkoba dan miras		Peraturan Perundangan, Perbup	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi antar instansi terkait 2. intensitas penyuluhan bahaya narkoba yang dilaksanakan 3. Cakupan peserta penyuluhan bahaya narkoba 4. Kompetensi Narasumber 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba 2. sikap apatis masyarakat terhadap peredaran narkoba 3. kemajuan teknologi sehingga timbulnya modus baru dalam peredaran narkoba 4. efek globalisasi yang sulit dibendung 	<ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Permasalahan pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada sebagian kelompok masyarakat;
2. Masih terjadinya fluktuasi partisipasi politik;
3. Masih kurangnya pembinaan ketahanan nasional dan bela negara kepada organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat.

-
4. Masih kurangnya sosialisasi dan penyuluhan tentang bahaya narkoba ditengah masyarakat

Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada berbagai elemen masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta partai politik tentang peraturan perundangan yang berkaitan dengan pemilu dan partai politik;
3. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan kepada ormas / LSM / organisasi kepemudaan dan organisasi lembaga swadaya masyarakat lainnya tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan HAM.
4. Mengadakan Pembinaan, Penyuluhan dan sosialisasi serta kampanye kepada elemen masyarakat tentang bahaya narkoba

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi dan Sistematika Pelaporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Menyajikan capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2016-2021 melalui Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 2016-2021 dengan komitmen yang kuat.

Implementasi Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari periode Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman.

Untuk mencapai kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2020. Dan menetapkan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020. Target-target kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Padang Pariaman menetapkan visi 2016 - 2021, yaitu : ***"Terwujudnya Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Yang Berwawasan Kebangsaan, Demokratis Menuju Kabupaten Padang Pariaman yang Aman dan Harmonis"*** adapun makna dari visi tersebut adalah terwujudnya kesadaran dan partisipasi

masyarakat dan terwujudnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan sejahtera.

2. Misi

Misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :

- ✚ Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.
- ✚ Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.
- ✚ Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.
- ✚ Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis tahun 2020

Tujuan dan sasaran strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman untuk tahun 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Mewujudkan Pemahaman, Kesadaran dan Fasilitasi Kehidupan Berpolitik.	Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat tentang Hak dan Tanggung Jawab Kehidupan Berpolitik yang harmonis, dinamis dan	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
	demokratis	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan terhadap Gangguan yang Timbul di Masyarakat.	Meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah	Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat.	Persentase potensi konflik sosial yang dapat dicegah
Meningkatkan Partisipasi serta kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba	Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan Miras	Jumlah kasus Narkoba	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	Jumlah kasus Narkoba
Mewujudkan yang memiliki pemahaman tentang	Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
nilai – nilai Wawasan Kebangsaan.	nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam masyarakat yang plural		ideologi serta ketahanan bangsa.	

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2020

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman maka ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 termasuk untuk Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, IKU Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik didukung oleh 4 Sasaran Strategis dengan 7 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
1.	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75%

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	60%
3.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	10 partai politik
4.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%
5.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	30 kasus
6.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Bupati Padang Pariaman yang mana telah ditetapkan melalui peraturan tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Pemerintah berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran 1).

AKUNTABILITAS KINERJA

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2019. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.1 Capaian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


Capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2020

NO	SasaranStrategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
1.	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah pasrtisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	75%	52,06%	69,41 %	Kurang Berhasil
2.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	%	60%	60%	100%	Sangat Berh

NO	SasaranStrategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	%	Interpretasi
							asil
3.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	Partai Politik	10 parpol	8 parpol	80%	Berhasil
4.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba ditengah masyarakat.	Kasus	30 Kasus	69 Kasus	43,47 %	Tidak Berhasil
6.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 :

	Sasaran 1: Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum
---	--

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

1. Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	75%	52,06%	69,41%

Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini adalah 75% partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum, dengan realisasi dari indikator tersebut adalah 52,06% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 69,41%. Untuk capaian indikator ini.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indikator yang sama adalah dengan 75% target dan terealisasi 69,5% dengan capaian 92,67%.

Adapun penyebab **kurang berhasilnya** kinerja tersebut adalah karena kurangnya animo masyarakat dalam memilih karena masyarakat kurang mengenal pasangan calon yang akan dipilih.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSEN TASE
I	Program Pendidikan Politik Masyarakat	115.385.770	111.606.400	3.779.370	96.72%
1.	Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada	78.810.770	75.793.900	3.016.870	96.17%
2.	Rapat Koordinasi Tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah	36.575.000	35.812.500	762.500	97,91%

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada

Anggaran **Rp36.575.000,00** dan realisasi **Rp35.812.500,00** atau sebesar **97,91%** dengan sisa dana sebesar **Rp762.500,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memfasilitasi pengawasan dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2020 disamping itu kepada seluruh anggota tim pengawas pelaksanaan Pemilu untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilih nya masing-masing.





b. Rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah

Anggaran **Rp36.575.000,00** dan realisasi **Rp35.812.500,00** atau sebesar **97,91%** dengan sisa dana sebesar **Rp762.500,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah terjalannya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Instansi terkait dengan tujuan untuk mensukseskan pemilu Kepala daerah. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya rapat Koordinasi tentang penyelenggaraan Pemilu Kada.





Sasaran 2:

Meningkatnya Pembinaan Ormas/LSM/Kelompok masyarakat

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

2. Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	60%	60%	100%

Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif tahun ini adalah 60% jumlah ormas/lsm yang aktif dan terdaftar dari Jumlah ormas/lsm yang terdata, realisasi dari indikator tersebut adalah sama 60% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan 60% target dan terealisasi 60% dengan capaian 100%.

Adapun faktor **berhasilnya** indikator kegiatan ini adalah disebabkan karena kegiatan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISAS I	SISA	PERSEN TASE
I	Program Pendidikan Politik Masyarakat	6.712.500	6.067.000	645.500	90.38%
3.	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring, dan Evaluasi Ormas/LSM	6.712.500	6.067.000	645.500	90.38%

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

c. Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM

Anggaran **Rp6.712.500,00** dan realisasi **Rp6.067.000,00** atau sebesar **90,38%** dengan sisa dana sebesar **Rp645.500,00**. Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah agar terdatanya, terpantaunya Ormas dan LSM yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya pendataan dan pemantauan terhadap ormas dan LSM.

	<p>Sasaran 3: Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi</p>
---	---

Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

3. Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	10 parpol	8 parpol	80%

Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu



Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu tahun ini adalah 8 (delapan) Partai Politik yang menyelesaikan laporan pertanggungjawaban tepat waktu dibandingkan dari 10 (Sepuluh) Partai Politik yang menerima bantuan APBD setiap tahun, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan 11 (sebelas) partai politik target dan terealisasi 8 (delapan) partai politik dengan capaian 73%.

Adapun penyebab **berhasilnya** kinerja tersebut adalah pemahaman pengurus partai politik tentang tertib administrasi keuangan partai. Adapun partai politik yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan tepat waktu tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hati Nurani Rakyat. Berikut partai politik yang mendapatkan bantuan keuangan dari APBD Tahun 2020 :

NO	PARTAI POLITIK	KURSI	Jumlah Suara	Jumlah Bulan	Nilai Persuara (Rp)	JUMLAH BANTUAN DANA PARTAI POLITIK (Rp)
1	Partai Kebangkitan Bangsa	4	15.313	12 bulan	5.000,00	76.565.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	32.871	12 bulan	5.000,00	164.355.000,00
3	Partai Golongan Karya	4	18.164	12 bulan	5.000,00	90.820.000,00
4	Partai Nasional Demokrat	3	14.183	12 bulan	5.000,00	70.915.000,00
5	Partai Keadilan Sejahtera	4	24.331	12 bulan	5.000,00	121.655.000,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	4	19.117	12 bulan	5.000,00	95.585.000,00
7	Partai Amanat Nasional	7	31.602	12 bulan	5.000,00	158.010.000,00
8	Partai Demokrat	4	19.166	12 bulan	5.000,00	95.830.000,00
9	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2	8.688	12 bulan	5.000,00	-
10	Partai Hati Nurani Rakyat	1	7,867	12 bulan	5.000,00	-
	JUMLAH	40	191.302			873.735.000

kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
I	Program Pendidikan Politik Masyarakat	15.982.500	15.425.000	557.500	96.51
4.	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	15,982,500	15,425,000	557,500	96.51

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

d. Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik

Anggaran **Rp15,982,500,00** dan realisasi **Rp15,425,000,00** atau sebesar **96,51%** dengan sisa dana sebesar **Rp557,500,00**. Maksud dan

tujuan kegiatan ini adalah agar terlaksananya Verifikasi terhadap Bantuan Dana Hibah yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yang telah ditetapkan yaitu terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik.

	<p>Sasaran 4: Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat</p>
---	--


Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

4. Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%

Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	
---	---

Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah tahun ini adalah 100%target yang didapat Jumlah Konflik yang terjadi dibandingkan dengan potensi konflik yang ada. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor **sangat berhasilnya** indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh kerjasama tim penagangan konflik sosial berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dan undang-undang serta faktor lainnya yaitu karakteristik masyarakat Padang Pariaman yang homogen dan berbudaya serta mengedepankan musyawah mufakat terlebih dahulu dalam penyelesaian suatu masalah sehingga potensi konflik yang terdeteksi sejak dini dapat dicegah.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :


NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERS ENTA SE
II	<i>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</i>	<i>83.562.500</i>	<i>77.133.600</i>	<i>6.428.900</i>	<i>92.3</i>
5.	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	83,562,500	77,133,600	6.428.900	92.3

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

e. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten

Anggaran **Rp83,562,500,00** dan realisasi **Rp77,133,600,00** atau sebesar **92,3%** dengan sisa dana sebesar **Rp6.428.900,00**. Maksud dan Tujuan kegiatan ini dilaksanakan adalah agar terpantau, tertangani dan tersedianya Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman selama 1 (satu) tahun di 17 (tujuh belas) Kecamatan. Kegiatan ini

telah terlaksana dengan realisasi output sesuai target yaitu tersedianya Dokumen Laporan Gangguan Keamanan Dalam Negeri di daerah Kabupaten Padang Pariaman per triwulan.

	<p>Sasaran 5: Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat</p>
---	---


Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

5. Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	30Kasus	69 Kasus	43,47%

Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	
--	---

Untuk target pada Indikator Kinerja Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat tahun ini adalah 30 kasustarget. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 69 kasus dengan capaian kinerja 43,47%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor **tidak berhasilnya** adalah pada tahun 2020 anggaran pendukung kegiatan ini di refocusing dan hanya dapat melakukan penyuluhan 1 (satu) kali saja sehingga target tidak tercapai.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
II	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)	30.798.800	30.798.800	-	100.00
6.	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	28,343,800	28,343,800	-	100.00
7.	Kegiatan Operasional BNK	2.455.000	2.455.000	-	100.00

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :


a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Anggaran **Rp28.343.800,00** dan realisasi **Rp28.343.800,00** atau sebesar **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp00,00**. Kegiatan ini telah terlaksana dengan realisasi output sesuai dengan target yaitu meningkatkan kesadaran Generasi Muda akan Bahaya Narkoba dan sejenisnya.



b. Kegiatan Operasional BNK

Pada DPA awal Tahun Anggaran 2020 kegiatan ini anggarannya sudah tersedia, karena terjadi pandemi Covid-19, maka anggaran kegiatan ini direfocusing. Anggaran **Rp2.455.000,00** dan realisasi **Rp2.455.000,00** atau sebesar **100%** dengan sisa dana sebesar **Rp00,00**.

	Sasaran 6: Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.
---	--


Dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2020. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan yang ditetapkan berupa :

6. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2020		
	Target	Realisasi	%
Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%

Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam 

Untuk target pada Indikator Kinerja Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam dengan upaya merusak tatanan kehidupan berbangsa tahun ini adalah 100% target yang didapat Jumlah Gangguan keamanan yang terjadi dibandingkan dengan potensi gangguan keamanan. Dan adapun realisasi dari indikator ini adalah 100% dengan capaian kinerja 100%.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja dengan indicator yang sama adalah dengan juga 100 dari target 100% dan realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

Adapun faktor **sangat berhasilnya** capaian indikator kegiatan ini adalah disebabkan oleh selain kerjasama tim lintas sektoral yang tergabung dalam tim penanganan konflik sosial berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan dan undang juga dilakukan pembinaan wawasan kebangsaan bagi tokoh masyarakat dan pembentukan forum pembauran kebangsaan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang beranggotakan dari unsur tokoh masyarakat antar etnis, suku dan budaya yang ada di Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	PERSENTASE
II	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	00,00	00,00	-	00
8.	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	00,00	00,00	-	00

kegiatan bersangkutan dapat mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan

Pada DPA awal Tahun Anggaran 2020 kegiatan ini anggarannya sudah tersedia, karena terjadi pandemic Covid-19, maka anggaran kegiatan ini di-*refocusing*, sehingga kegiatan ini tidak terlaksana.

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019	Tahun 2020			Interpretasi
				Target	Realisasi	%	
	INDIKATOR KINERJA UTAMA						
1.	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah pasrtisipasi masyarakat dalam Pemilu	69,5%	75%	52,06%	69,41%	Kurang Berhasil
2.	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/keompok masyarakat	Persentase ormas/keompok yang terdaftar dan aktif	60%	60%	60%	100%	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat waktu	9 parpol	10 parpol	8 parpol	80%	Berhasil
4.	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil
5.	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba ditengah masyarakat.	30 Kasus	30 Kasus	69 Kasus	43,47%	Tidak Berhasil
6.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	100%	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

Tabel 3.3
Perbandingan Target Realisasi Kinerja Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET JANGKA MENENGAH					REALISASI JANGKA MENENGAH					% REALISASI DI TAHUN INI (2020)/TARGET AKHIR JANGKA MENENGAH (2021)	INTERPRETASI
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum	Persentase jumlah partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%				75%	75%				69,5%	52,06%	52,06%	
2	Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat	Persentase ormas/kelompok yang terdaftar dan aktif	%	58%	60%	60%	60%	60%	58%	58%	58%	60%	60%	60%	
3	Meningkatnya kesadaran Parpol atas tata kelola keuangan	Persentase Laporan pertanggungjawaban Parpol tepat	Partai Politik	11 Partai Politik	11 Partai Politik	11 Partai Politik	11 Partai Politik	10 parpol	9 Partai Politik	9 Partai Politik	9 Partai Politik	9 parpol	8 parpol	8 parpol	

	dan administrasi	waktu													
4	Meningkatnya keamanan & ketertiban masyarakat	Persentase jumlah potensi konflik sosial yang dapat dicegah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Menurunnya kasus narkoba ditengah masyarakat	Menurunnya kasus Narkoba di tengah masyarakat.	Kasus	54 Kasus	36 Kasus	36 Kasus	30 Kasus	30 Kasus	54 Kasus	36 Kasus	36 Kasus	30 Kasus	69 Kasus	69 Kasus	
6	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap ideologi serta ketahanan bangsa.	Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Nasional (jika ada)	Realisasi 2020	%	Interpretasi
1	2	3	4	5	6	7	8

Tabel 3.5
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

URAIAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020
JUMLAH PROGRAM	8	7
JUMLAH KEGIATAN	24	20
JUMLAH ANGGARAN	1,111,860,750.00	565,756,480.00
TOTAL EFISIENSI		546,104,270.00

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman tidak hanya terbatas pada APBD Kabupaten Padang Pariaman, tetapi juga sumber pendanaan lainnya, baik dana dekonsentrasi, APBN Murni, maupun dana Tugas Pembantuan.

Realisasi keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020.

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22,000,000	19,695,000	2,305,000	89.52	Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat Kantor selama 12 bulan
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	45,820,000	36,210,000	9,610,000	79.03	Meningkatnya Kinerja Keuangan yang akuntabel selama 12 bulan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	27,830,000	27,830,000	-	100.00	Meningkatnya suasana kerja yang nyaman serta tersedianya peralatan kebersihan kantor selama 12 bulan
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2,160,000	2,160,000	-	100.00	Meningkatnya wawasan karyawan/karyawati selama 12 bulan
5	Penyediaan Makanan dan Minuman	7,863,000	7,727,500	135,500	98.28	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum rapat/tamu selama 12 bulan
6	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	24,330,300	24,052,500	277,800	98.86	Adanya koordinasi dari tingkat Kabupaten, Dinas Instansi terkait di wilayah Kabupaten selama 12 bulan
7	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran	126,000,000	124,800,000	1,200,000	99.05	Meningkatnya kinerja Swakelola sebanyak 6 (enam) orang selama 12 bulan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
8	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	15,000,000	-	100.00	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Peralatan Gedung Kantor sebanyak 1 (satu) unit berupa Proyektor (Infocus)
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	32,617,900	30,460,000	2,157,900	93.38	Terpenuhinya jasa service, belanja penggantian suku cadang dan BBM dan Pelumas Kendaraan Dinas selama 12 bulan
10	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	5,700,000	2,620,000	3,080,000	45.96	Terpeliharanya perlengkapan kantor secara rutin/berkala OPD selama 12 bulan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1,040,000	1,040,000	-	100.00	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan handal
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
12	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11,688,520	10,183,000	1,505,520	87.12	Tersedianya laporan LAKIP, LPPD, Renstra, RKA, DPA, Laporan Keuangan Semesteran pada OPD selama 12 bulan
	JUMLAH PINDAH KE HALAMAN 02	322,049,720	301,778,000	20,271,720	93.71	

NO	Uraian	Jumlah Dana	Realisasi	Sisa Dana	%	Capaian Program dan Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7
	JUMLAH PINDAHAN DARI HALAMAN 01	322,049,720	301,778,000	20,271,720	93.71	
13	Penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD	40,400,890	39,525,200	875,690	97.83	Terusunnya rencana kerja dan penganggaran SKPD selama 12 bulan
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					
14	Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah Tingkat Kabupaten	83,562,500	77,133,600	6,428,900	92.31	Terpantaunya Gangguan Keamanan Dalam Negeri di Daerah se - Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)					
15	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	28,343,800	28,343,800	-	100.00	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba terhadap Generasi Muda Kabupaten Padang Pariaman dengan peserta 80 orang
16	Operasional BNK	2,455,000	2,455,000	-	100.00	Terlaksananya operasional BNK
	Program Pendidikan Politik Masyarakat					
17	Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring, dan Evaluasi Ormas/LSM	6,712,500	6,067,000	645,500	90.38	Terpantaunya dan terdatanya Keberadaan Ormas dan LSM di Kabupaten Padang Pariaman selama 12 bulan
18	Fasilitasi Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kada	78,810,770	75,793,900	3,016,870	96.17	Tesediarnya data dan informasi lembaga penyelenggara pemilu yang akurat
19	Rapat Koordinasi Tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah	36,575,000	35,812,500	762,500	97.92	Terlaksananya koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum
20	Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol	12,613,800	12,613,800	-	100.00	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Parpol Tepat Waktu
21	Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik	15,982,500	15,425,000	557,500	96.51	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap Bantuan Dana Papol untuk Tahun 2020 sebanyak 10 Parpol dan terealisasi sebanyak 8 Parpol
	JUMLAH	627,506,480	594,947,800	32,558,680	94.81	

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk bertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2020 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian kinerja di tahun 2020 ini.

Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

4.2 LANGKAH KE DEPAN

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum melalui pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat dengan Fasilitas Tim Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan kegiatan Rapat Koordinasi tentang Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah.

-
2. Meningkatnya pembinaan ormas/LSM/kelompok masyarakat, melalui pelaksanaan program Pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan Updating dan Komputerisasi Data Ormas, Monitoring dan Evaluasi Ormas dan LSM.
 3. Meningkatnya kesadaran parpol atas tata kelola keuangan dan administrasi, melalui pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bantuan Dana Partai Politik dan Kegiatan Pembekalan Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Parpol.
 4. Persentase gangguan keamanan yang dapat diredam, melalui pelaksanaan program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan.
 5. Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, melalui pelaksanaan program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Daerah tingkat Kabupaten dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini pemerintah daerah.
 6. Menurunnya kasus narkoba di tengah masyarakat, melalui pelaksanaan program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) dengan kegiatan Penyuluhan Pencegahan/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba, kegiatan Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) di Kabupaten Padang Pariaman dan Kegiatan Operasional BNK.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengharapkan Laporan Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, masyarakat Kabupaten Padang Pariaman maupun kepada *stakeholders* yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan berkahnya dalam segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Parit Malintang, Februari 2021

**Pit. KEPALA KANTOR KESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



SADRIL, S.Sos, MM

NIP. 19650204 198602 1 003